



***RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026***



***SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah kegiatan pokok berupa pemberian fasilitasi dan penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kebijakan, dan kegiatan penunjang berupa kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana maupun penyediaan dukungan peralatan dan personil.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya.

Nunukan, 14 Juli 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. Jabbar, M. Si
Nip. 196510011997111001

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
3.2 Program dan Kegiatan.....	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V	
PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga Pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Bupati Nunukan. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yaitu Belum Maksimalnya penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah serta fasilitasi bantuan hukum, Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan SDA, Data administrasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis kebijakan pembangunan daerah, belum terintegrasi dan bersifat *realtime*, Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah, Rendahnya kapasitas aparatur perangkat daerah, Masih rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah, Belum maksimalnya proses pengadaan barang/jasa, Masih rendahnya kualitas pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika Penyusunan Rencana Kerja sekretariat Kabupaten Nunukan Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (RENJA) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilaksanakan tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH**

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, sub kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program, kegiatan, sub kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi capaian kinerja rencana kerja 2025 dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Nunukan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi 2024	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4)
	SEKRETARIAT DAERAH									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100.00%	100%	100.00%	123.44%		100.00%		
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN								-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100.00%	100.00%	100	100.00%	100.00%	100.00%	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	14 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	11 Dokumen	78.57%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	75.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	75.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	75.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	75.00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	6 Laporan	18 Laporan	75.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100.00%	115,31 %	100.00%	131.82%	131.82%	100.00%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/buln	94 Orang/buln	105 Orang/buln	105 Orang/buln	100.00%	120 Orang/buln	105 Orang/buln	87.50%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3775 Dokumen	1,999 Dokumen	750 Dokumen	1466 Dokumen	195.47%	760 Dokumen	4,225 Dokumen	111.92%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	70	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	100.00%	14	Laporan	42	Laporan	60.00%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95.00%	%	88.85%	%	95.00%	%	100%	105.26%	100.00%					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	2	orang/bulan	2	orang/bulan	2	orang/bulan	100.00%	2	orang/bulan	6	orang/bulan	300.00%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94	Paket	22	Paket	20	Paket	13	Paket	65.00%	20	Paket	55	Paket	58.51%
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	2	Orang	2	Orang	2	Orang	100.00%	2	Orang	6	Orang	300.00%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/bulan	2	Orang/bulan	2	Orang/bulan	2	Orang/bulan	100.00%	2	Orang/bulan	2	Orang/bulan	100.00%
	BAGIAN UMUM															

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	%	52.18%	%	100.00%	%	100.00%	100.00%	100.00%					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%	1	Dokumen	2	Dokumen	50.00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100.00%	2	Laporan	6	Laporan	75.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.00%	%	95.24%	%	87.00%	%	105.00%	120.69%	90.00%					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	465	Dokumen	100	Dokumen	100	Dokumen	105	Dokumen	105.00%	120	Dokumen	325	Dokumen	69.89%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92.00%	%	91.97%	%	90.00%		104.12%	115.68%	92.00%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	35	Paket	12	Paket	8	Paket	7	Paket	87.50%	7	Paket	26	Paket	74.29%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40	Paket	49	Paket	10	Paket	11	Paket	110.00%	8	Paket	68	Paket	170.00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	40	Paket	16	Paket	8	Paket	8	Paket	100.00%	8	Paket	32	Paket	80.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	180 Paket	86 Paket	40 Paket	40 Paket	100.00%	36 Paket	162 Paket	90.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 Paket	12 Paket	9 Paket	9 Paket	100.00%	7 Paket	28 Paket	80.00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	290 Laporan	218 Laporan	62 Laporan	60 Laporan	96.77%	58 Laporan	336 Laporan	115.86%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	40,000 Dokumen	13,370 Dokumen	6000 Dokumen	8072 Dokumen	134.53%	8000 Dokumen	29,442 Dokumen	73.61%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	6 Unit	3 Unit	6 Unit	200.00%	5		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	6 Unit	3 Unit	6 Unit	200.00%	5 Unit	17 Unit	170.00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	%	90%	131.78%	146.42%	95.00%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4037 Laporan	2,237 Laporan	800 Laporan	1498 Laporan	187.25%	800 Laporan	4,535 Laporan	112.34%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	253 Laporan	174 Laporan	55 Laporan	57 Laporan	103.64%	50 Laporan	281 Laporan	111.07%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	225 Laporan	115 Laporan	45 Laporan	47 Laporan	104.44%	45 Laporan	207 Laporan	92.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%	%	90%	197.82%	219.80%	95.00%							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	12	Unit	12	Unit	21	Unit	175.00%	12	Unit	45	Unit	375.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84	Unit	84	Unit	84	Unit	79	Unit	94.05%	84	Unit	247	Unit	294.05%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	220	Unit	220	Unit	45	Unit	190	Unit	422.22%	220	Unit	630	Unit	286.36%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25	Unit	12	Unit	7	Unit	7	Unit	100.00%	5	Unit	24	Unit	96.00%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95	%	%	90%	83.33%	92.59%	95.00%							
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	100	Paket	47	Paket	20	Paket	18	Paket	90.00%	20	Paket	85	Paket	85.00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100	Paket	45	Paket	20	Paket	17	Paket	85.00%	20	Paket	82	Paket	82.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	140	Paket	42	Paket	20	Paket	15	Paket	75.00%	28	Paket	85	Paket	60.71%
	BAGIAN ORGANISASI															
	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100.00%		100.00%		100.00%	%	124.82%		124.82%	100.00%				
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250	Dokumen	100	Dokumen	50	Dokumen	50	Dokumen	100.00%	50	Dokumen	200	Dokumen	80.00%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	240	Laporan	93	Laporan	48	Laporan	46	Laporan	95.83%	48	Laporan	187	Laporan	77.92%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	48	Dokumen	33	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200.00%	12	Dokumen	47	Dokumen	97.92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145	Dokumen	59	Dokumen	29	Dokumen	30	Dokumen	103.45%	29	Dokumen	118	Dokumen	81.38%
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN															
	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan	95.00%	%	101.04%	%	95.00%	%	145.63%		153.29%	95.00%				
	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	2000	Laporan	885	Laporan	460	Laporan	499	Laporan	108.48%	450	Laporan	1,834	Laporan	91.70%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	950	Laporan	265	Laporan	250	Laporan	322	Laporan	128.80%	210	Laporan	797	Laporan	83.89%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950 Laporan	633 Laporan	250 Laporan	499 Laporan	199.60%	210 Laporan	1,342 Laporan	141.26%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100 %	%	100%	141.91%	141.91%	100.00%		
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	sangat rendah	Sangat Tinggi (4,21-5,00)			Sangat Tinggi (4,21-5,00)		
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35 Dokumen	11 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	71.43%	7 Dokumen	23 Dokumen	65.71%
	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	20 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	15 Dokumen	75.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90.00% %	67.50%	90.00%	179.17%	199.08%	90.00%		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Dalam Negeri	20 Dokumen	11 Dokumen	4 Dokumen	13 Dokumen	325.00%	4 Dokumen	28 Dokumen	140.00%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	4 Dokumen	50.00%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	16 Dokumen	- Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	162.50%	8 Dokumen	21 Dokumen	131.25%
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	95.00% %	103.34% %	90.00%	170.63%	189.59%	90.00%		

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	212 Dokumen	86 Dokumen	42 Dokumen	117 Dokumen	278.57%	43 Dokumen	246 Dokumen	116.04%
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	15 Dokumen	13 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	133.33%	3 Dokumen	20 Dokumen	133.33%
	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	10 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	7 Dokumen	70.00%
	BAGIAN HUKUM									

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Poduk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	95.00%	%	118.39%	90.00%	113.19%	125.77%	90.00%							
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2020	Dokumen	818	Dokumen	700	Dokumen	780	Dokumen	111.43%	500	Dokumen	2,098	Dokumen	103.86%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	28	Kasus	11	Kasus	6	Kasus	7	Kasus	116.67%	6	Kasus	24	Kasus	85.71%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2048	Dokumen	817	Dokumen	706	Dokumen	787	Dokumen	111.47%	506	Dokumen	2,110	Dokumen	103.03%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	86	Nilai	Nilai	73	Nilai	77.17	Nilai	105.71%	86					
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA															
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	85.00%	%	97.22%	85.00%	119.61%	140.72%	85.00%							
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150.00%	2	Dokumen	9	Dokumen	90.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1	4 1,289,327,000	80.00%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14 Dokumen	54 Dokumen	34 Dokumen	37 Dokumen	108.82%	14	105 15,862,000	750.00%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	85.00% %	71.59% %	85.00% %	133.33%	156.86%	85.00%		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	3 Dokumen	10 Dokumen	66.67%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	10 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	2 Dokumen	9 Dokumen	90.00%

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00%	1 Dokumen	6 Dokumen	120.00%
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	111.11%	95.00%		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	5 Dokumen	50.00%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1 Laporan	5 Laporan	50.00%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2 Laporan	8 Laporan	80.00%
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA									
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100.00%	149.26%	100.00%	301.14%	301.14%	100.00%		

RENCANA KERJA TAHUN 2026

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Dokumen	226 Dokumen	70 Dokumen	225 Dokumen	321.43%	70 Dokumen	521 Dokumen	148.86%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115 Dokumen	67 Dokumen	20 Dokumen	75 Dokumen	375.00%	20 Dokumen	162 Dokumen	140.87%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500 Orang	326 Orang	100 Orang	207 Orang	207.00%	100 Orang	633 Orang	126.60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	B	CC	B	BB	B	
2	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten			B	B	B	BB	B	B	B	BB	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	87	88	89	85,83	86,99	88.57	89	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)			40,00	63	73	86	40,20	67,90	77.17	86	
5	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum			100%	100%	100%	100%	103,02%	92,87%	141%	100%	
6	Nilai LPPD			Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah (2,55)	Sangat Rendah (1,6769)	Belum rilis	Sangat Tinggi	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

7	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Poduk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas			85%	85%	90%	90%	114,83%	121,95%	113.19%	90%	
8	Persentase kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang tepat sasaran			85%	85%	90%	90	100%	106,67%	170.63 %	90	
9	Persentase realisasi program perekonomian dan SDA, administrasi pembangunan serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah			100%	100%	100%	100%	106,46%	115,39%	175.87%	100%	
10	Persentase capaian kinerja kebijakan bidang perekonomian dan SDA			80%	80%	85%	85%	94,44%	100%	126.47 %	85%	
11	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan			80%	85%	90%	95%	100%	100%	100	95%	
12	Persentase pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai SOP			80%	90%	100%	100%	136,94%	161,57%	301.14%	100%	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

13	Persentase realisasi tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah			100%	87%	100%	100%	100,48%	111,06%	123.44%	100%	
14	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	124.82	100%	
15	Persentase Pelayanan administrasi tata usaha pimpinan, aparatur dan sarana prasarana			87%	89%	90%	92%	101,24%	126,60%	120.34	92%	
16	Persentase capaian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan perangkat daerah.			100%	100%	100%	100%	102,07%	100%	107.69	100%	
17	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan			95%	95%	95%	95%	101,89%	145,48%	145.63	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi OPD sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja OPD. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ ancaman, harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/ kekuatan, dapat dimanfaatkan karena isu tersebut akan mengakibatkan OPD dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Pelaksanaan Kegiatan reformasi birokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Input rencana aksi RB ke dalam sistem tidak tepat waktu Pemerintah Kabupaten Nunukan belum menyusun Peta Proses Bisnis di level Pemkab dan OPD;
 - c. Kegiatan Monitoring terhadap rencana aksi tidak terlaksana dengan maksimal;
 - d. Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh OPD.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan, diantaranya disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. Target penyampaian ke Menpan yang terlambat;
 - c. LKJIP OPD tidak tepat waktu dan tidak tepat sistematika penulisan;
 - d. Hasil monitoring evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan perbaikan penerapan SAKIP, termasuk belum menyertakan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas hasil evaluasi tersebut, sebagai tools dalam memantau tindak lanjut rekomendasi inspektorat;
3. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
- Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalami beberapa kendala khususnya terhadap pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:
- a. Tidak semua pimpinan unit pelayanan menganggap survey kepuasan masyarakat menjadi kegiatan prioritas sehingga tidak menjalankan survey dimaksud;
 - b. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tidak valid;
 - c. Beberapa Unit pelayanan publik tidak memiliki akses telekomunikasi yang baik, sehingga proses pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tidak optimal;
 - d. Tidak berjalannya proses survey kepuasan masyarakat di beberapa unit pelayanan publik, dikarenakan adanya perubahan/mutasi petugas pelaksana/penyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
 - e. Tidak melakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah:

- a. Pengumuman RUP tidak tepat waktu;
 - b. Proses tender pengadaan barang/jasa terlambat;
 - c. Keterlambatan penerbitan Berita Acara Hasil Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Operator/admin yang bertugas melaksanakan penginputan aplikasi SIRUP dan SPSE kurang memahami dan memiliki kompetensi yang baik di bidang pengadaan barang dan jasa;
 - e. Terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi dan Kompetensi SDM pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan;
 - f. Kurangnya minat dari ASN yang ada untuk menjadi pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, karena pertimbangan resiko dan insentif yang tidak sesuai dengan beban dan resiko jabatan;
 - g. Masih rendahnya tingkat kematangan UKPBJ;
 - h. Belum terpenuhinya standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, dimana dari 17 standar yang ada, baru terpenuhi 12 standar layanan pengadaan.
5. Belum optimalnya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan diantaranya adalah:
- a. Data LPPD dari OPD belum memenuhi ketentuan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program, kegiatan, sub kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN N (rinci Desa dan Kecamatan)	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				88,287,967,398		URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				88,350,375,883	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	58,852,514,481		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	58,769,874,206	
I	SEKRETARIAT DAERAH				19,598,121,426		SEKRETARIAT DAERAH				19,605,184,517	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	19,149,957,338	Nunukan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	19,149,957,338	Nunukan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	147	19,149,957,338	Nunukan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	147	19,149,957,338	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	448,164,088	Nunukan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	455,227,179	Nunukan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	448,164,088	Nunukan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	455,227,179	Nunukan
II	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				2,350,197,585		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				2,232,252,605	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	232,099,585	Nunukan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	304,598,485	Nunukan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	38,965,620	Nunukan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	131,172,550	Nunukan
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	24,110,300	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	22,219,400	Nunukan
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	24,999,190	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	23,137,000	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	24,999,735	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	24,999,735	Nunukan
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	24,998,400	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	24,998,400	Nunukan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	94,026,340	Nunukan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	78,071,400	Nunukan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	1,083,542,000	Nunukan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	849,514,120	Nunukan
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	935,657,050	Nunukan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	772,374,620	Nunukan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	147,884,950	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	77,139,500	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	1,034,556,000	Nunukan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	1,078,140,000	Nunukan
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	174,556,000	Nunukan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	218,140,000	Nunukan
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	260,000,000	Nunukan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	260,000,000	Nunukan
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	600,000,000	Nunukan	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	600,000,000	Nunukan
III	BAGIAN UMUM				25,504,419,090		BAGIAN UMUM				25,362,237,354	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	120,000,000	Nunukan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	119,999,260	Nunukan
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Nunukan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	19,999,505	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	100,000,000	Nunukan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	99,999,755	Nunukan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	30,000,000	Nunukan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	29,999,965	Nunukan
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	30,000,000	Nunukan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	29,999,965	Nunukan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	5,304,016,090		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	4,816,240,373	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	132,367,620	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	86,171,400	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	1,381,824,080	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	1,366,624,080	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	734,775,920	Nunukan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	293,544,958	Nunukan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	334,778,600	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	335,636,560	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,217,550	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,050,055	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	58	2,560,152,320	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	58	2,574,422,320	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	87,900,000	Nunukan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	87,791,000	Nunukan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	2,800,000,000	Nunukan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	1,453,000,000	Nunukan
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	2,800,000,000	Nunukan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	1,453,000,000	Nunukan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	9,330,143,040		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	10,992,778,040	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	51,250,000	Nunukan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	51,250,000	Nunukan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,960,634,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,960,454,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	6,318,259,040	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	7,981,074,040	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	5,311,540,080		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	5,341,490,266	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	535,629,410	Nunukan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	535,628,146	Nunukan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1,376,798,370	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1,394,598,370	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,921,751,050	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,933,902,500	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,477,361,250	Nunukan (Kantor Bupati), Guesthouse dan Rumah Wakil), Jakarta, Malang, Samarinda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,477,361,250	Nunukan (Kantor Bupati), Guesthouse dan Rumah Wakil), Jakarta, Malang, Samarinda

RENCANA KERJA TAHUN 2026

7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,608,719,880	Nunukan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,608,729,450	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,372,766,570	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,372,781,660	Nunukan
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	998,280,210	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	998,274,990	Nunukan
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	28	237,673,100	Nunukan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	28	237,672,800	Nunukan
IV	BAGIAN ORGANISASI				1,666,955,500		BAGIAN ORGANISASI				1,790,788,750	
1	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	1,666,955,500	Nunukan	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	1,790,788,750	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	616,989,250	Nunukan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	831,152,000	Nunukan
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	299,986,750	Nunukan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	209,685,500	Nunukan
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	349,988,000	Nunukan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	349,977,000	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	51	399,991,500	Nunukan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	29	399,974,250	Nunukan
V	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				9,732,820,880		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				9,779,410,980	
1	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	9,732,820,880		Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	9,779,410,980	
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	450	6,994,090,650		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	450	6,143,793,250	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	1,988,730,230		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	2,885,734,230	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	210	750,000,000		Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Laporan	210	749,883,500	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	16,103,733,145		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	16,248,781,905	
VI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1,418,608,740		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1,867,530,800	
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,305,186,391	Nunukan	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,724,072,010	Nunukan
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	624,699,780	Nunukan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	934,815,550	Nunukan
2	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	680,486,611	Nunukan	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	789,256,460	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	90%	113,422,349	Nunukan	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	90%	143,458,790	Nunukan
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	65,336,000	Nunukan	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	65,179,670	Nunukan
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	19,578,000	Nunukan	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	49,536,000	Nunukan
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	28,508,349	Nunukan	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	28,743,120	Nunukan
VII	BAGIAN KESRA				13,560,177,300		BAGIAN KESRA				13,256,304,000	
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	13,560,177,300		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	13,256,304,000	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	43	10,027,756,800	Nunukan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	43	10,210,808,000	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	1,125,198,700	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	599,026,000	Nunukan
3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	2,407,221,800	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	2,446,470,000	Nunukan
VII I	BAGIAN HUKUM				1,124,947,105		BAGIAN HUKUM				1,124,947,105	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	1,124,947,105	Nunukan	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	1,124,947,105	Nunukan
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500	367,989,640	Nunukan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500	367,989,640	Nunukan
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	590,005,600	Nunukan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	590,005,600	Nunukan
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	506	166,951,865	Nunukan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	506	166,951,865	Nunukan
III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	13,331,719,772	Nunukan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	13,331,719,772	Nunukan
IX	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				11,560,000,000		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				11,560,000,000	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	11,110,000,000	Nunukan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	11,110,000,000	Nunukan
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen	2	250,000,000	Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen	2	250,000,000	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

		Pengelolaan BUMD dan BLUD					Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD				
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	10,650,000,000	Nunukan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	10,650,000,000	Nunukan
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	10	210,000,000	Nunukan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	10	210,000,000	Nunukan
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	450,000,000	Kab. Nunukan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	450,000,000	Kab. Nunukan
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan
X	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				716,746,600		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				716,746,600	
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	716,746,600	Nunukan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	716,746,600	Nunukan
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	76,500,000	Nunukan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	76,500,000	Nunukan
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	76,000,000	Nunukan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	76,000,000	Nunukan
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	564,246,600	Nunukan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	564,246,600	Nunukan
XI	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1,054,973,172		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1,054,973,172	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,054,973,172	Nunukan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,054,973,172	Nunukan

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	253,812,772	Nunukan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	253,812,772	Nunukan
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	517,488,000	Nunukan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	517,488,000	Nunukan
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	283,672,400	Nunukan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	283,672,400	Nunukan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang di tujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum PD), dan Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nunukan, tidak ada usulan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta program strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional tahun 2025 yaitu "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, RKP 2026 tetap melanjutkan pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. **Penguatan SDM dan Daya Saing Daerah:** Memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah;
2. **Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik:** Melakukan perbaikan birokrasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik yang lebih baik;
3. **Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan:** Memperkuat aspek-aspek dasar ketahanan nasional;
4. **Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata;
5. **Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan:** Fokus pada pembangunan di seluruh wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi;

Lebih lanjut, RKP 2026 menetapkan sasaran pembangunan yang

mencakup pertumbuhan ekonomi dengan target 5,8% - 6,3%, tingkat kemiskinan 6,5% - 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44% - 4,96%, , rasio gini 0,377 - 0,380 poin, Penurunan intensitas emisi GRK 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%.

Arah kebijakan RKP Tahun 2026 adalah meneguhkan kedaulatan pangan dan energi serta membangun ekonomi yang produktif dan inklusif, dengan fokus pada program prioritas unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, dan penguatan ekonomi desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Nunukan memiliki Visi: “Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri”. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan, maka ditetapkan lima misi yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas sehat dan berkarakter;
- (2) Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya local;
- (3) Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas;
- (4) Percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata.
- (5) Menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, mendukung dalam mewujudkan Misi Ke-3 yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan melayani cepat dan tuntas”.

Demi terwujudnya Visi Misi Kabupaten Nunukan dalam RPJMD

Tahun 2025 – 2029 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan memiliki Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Tahun 2026 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Nunukan Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif		Nilai Reformasi Birokrasi (RB General) (Nilai)	65.3	
2		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)(Nilai)	3.41-4.20 (Tinggi)	
3		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Realisasi Belanja Pengadaan UMK-K dan PDN (%)	58%	
4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	90%	

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2026 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 program, 19 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini ini terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
 - c. Kegiatan Penataan Organisasi, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis

- Jabatan, Sub Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.
- d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - e. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
 - f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - g. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan.
 - i. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa

- Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- j. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - k. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - l. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
 - m. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan, Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, yang terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi

Kewilayahan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

- b. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
 - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa.

- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 serta Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nunukan. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 22 kegiatan, dan 67 sub kegiatan.
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 88.350.375.883,- (Delapan puluh Delapan Milyar Tiga Ratus lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nunukan. Ada pun Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				88,350,375,883			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	58,769,874,206			
I	SEKRETARIAT DAERAH				19,605,184,517			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	19,149,957,338	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	147	19,149,957,338	Nunukan	APBD KAB.	
2	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	455,227,179	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	455,227,179	Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

II	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				2,232,252,605			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	Persen	100%	304,598,485	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	131,172,550	Nunukan	APBD KAB.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	22,219,400	Nunukan	APBD KAB.	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	23,137,000	Nunukan	APBD KAB.	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	24,999,735	Nunukan	APBD KAB.	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	24,998,400	Nunukan	APBD KAB.	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	78,071,400	Nunukan	APBD KAB.	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	Persen	100%	849,514,120	Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	760	772,374,620	Nunukan	APBD KAB.	Honorarium Pengelola Keuangan Setda (KPA,PPK, PPK-Unit, Bendahara, Bendahara Pembantu)
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	77,139,500	Nunukan	APBD KAB.	
3	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan	95%	1,078,140,000	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	20	218,140,000	Nunukan	APBD KAB.	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan Bupati dan Wabup
2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	260,000,000	Nunukan	APBD KAB.	Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH beserta anggota keluarga
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	600,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
III	BAGIAN UMUM				25,362,237,354			
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	119,999,260	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	19,999,505	Nunukan	APBD KAB.	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	99,999,755	Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	10,992,778,040		APBD KAB.	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	800	51,250,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	50	2,960,454,000	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	45	7,981,074,040	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95%	5,341,490,266		APBD KAB.	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	535,628,146	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	84	1,394,598,370	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	220	1,933,902,500	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	1,477,361,250	Nunukan (Kantor Bupati), Guesthouse dan Rumah Wakil), Jakarta, Malang, Samarinda	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	90%	29,999,965	Nunukan	APBD KAB.	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	120	29,999,965	Nunukan	APBD KAB.	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persen	92%	4,816,240,373		APBD KAB.	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	7	86,171,400	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	8	1,366,624,080	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	8	293,544,958	Nunukan	APBD KAB.	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	36	335,636,560	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	7	72,050,055	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	58	2,574,422,320	Nunukan, Jakarta, Tanjung Selor & Tarakan	APBD KAB.	
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	8000	87,791,000	Nunukan	APBD KAB.	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	1,453,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	1,453,000,000	Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

7	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	95%	2,608,729,450	Nunukan	APBD KAB.	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	1,372,781,660	Nunukan	APBD KAB.	
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	20	998,274,990	Nunukan	APBD KAB.	
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	Paket	28	237,672,800	Nunukan	APBD KAB.	
IV	BAGIAN ORGANISASI				1,790,788,750			
1	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	Persen	100%	1,790,788,750	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	50	831,152,000	Nunukan	APBD KAB.	Penyederhanaan Birokrasi/kelembagaan dan Anjab OPD serta evaluasi kelembagaan
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	48	209,685,500	Nunukan	APBD KAB.	Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik, penilaian ombudsman dan PEKPPP Menpan RB
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	349,977,000	Nunukan	APBD KAB.	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	29	399,974,250	Nunukan	APBD KAB.	Pendampingan dan Evaluasi Implementasi SAKIP Pemda NNK
V	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				9,779,410,980			
1	Pelaksanaan Protokol dan Komukasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	95%	9,779,410,980		APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	450	6,143,793,250		APBD KAB.	
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	210	2,885,734,230		APBD KAB.	
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	210	749,883,500		APBD KAB.	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	Persentase Realisasi	100%	16,248,781,905			
VI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1,867,530,800			
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Nilai	Sangat Tinggi (4,21-5,00)	1,724,072,010	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	7	934,815,550	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan otonomi Daerah	Dokumen	4	789,256,460	Nunukan	APBD KAB.	Evaluasi LPPD, SPM
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persen	90%	143,458,790	Nunukan		
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	4	65,179,670	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	49,536,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	12	28,743,120	Nunukan	APBD KAB.	
VII	BAGIAN KESRA				13,256,304,000			
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	Persentase	90%	13,256,304,000		APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	43	10,210,808,000	Nunukan	APBD KAB.	Anggaran Hibah/Bansos Daerah (termasuk LPTQ)
2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	599,026,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas.	Dokumen	2	2,446,470,000	Nunukan	APBD KAB.	Beasiswa
VIII BAGIAN HUKUM					1,124,947,105			
1	Fasilitas Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Produk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	Persen	90%	1,124,947,105	Nunukan	APBD KAB.	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500	367,989,640	Nunukan	APBD KAB.	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	6	590,005,600	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	506	166,951,865	Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

III	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Sistem Informasi, SDM Kematangan UKPBJ)	Indeks	86.00	13,331,719,772	Nunukan		
IX	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				11,560,000,000			
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase	85%	11,110,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	250,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	10,650,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	10	210,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA	Persentase	85%	450,000,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	150,000,000	Kab. Nunukan	APBD KAB.	
X	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				716,746,600			
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan	Persen	95%	716,746,600	Nunukan	APBD KAB.	
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	76,500,000	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	76,000,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	564,246,600	Nunukan	APBD KAB.	
XI	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				1,054,973,172			
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	Persen	100%	1,054,973,172	Nunukan	APBD KAB.	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	70	253,812,772	Nunukan	APBD KAB.	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	20	517,488,000	Nunukan	APBD KAB.	
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100	283,672,400	Nunukan	APBD KAB.	

BAB V
PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Kabupaten Nunukan. Rencana Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Nunukan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dapat berperan dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, juga diharapkan mampu mengimplementasikan profesionalismenya dengan berpikir rasional, memiliki komitmen dan etika, baik sebagai fasilitator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator, Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu. Rencana Kerja Sekretariat Daerah akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa secara pribadi. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan **political will** organisasi.

Demikian, semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Plt. Sekretaris Daerah



Ir. Jabbar, M.Si

NIP.196510011997111001